

ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2020



ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2020



ANALISIS INDEKS WILLIAMSON

PROVINSI JAWA TENGAH

ISBN : 978-623-6294-10-9

Nomor Publikasi : 33000.2178

Katalog : 9201024.33

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : x + 55 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Ir. Adhi Wiriana, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.
Mathius Samuharwadi, S.ST

Penulis : Diana Dwi Susanti, S.ST
Hayu Wuranti, S.Si

Desain dan Layout : Joko Mulyono

Penyusun : Diana Dwi Susanti, S.ST
Hayu Wuranti, S.Si

KATA PENGANTAR

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Penyusunan publikasi Analisis Indeks Williamson 2016-2020 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah..

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Adhi Wiriana

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INFOGRAFIS	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan dan Manfaat	5
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN	11
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2. Gini Rasio	12
2.3. Ukuran Ketimpangan Antarwilayah	12
BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH	15
3.1. Geografis Dan Demografi Jawa Tengah	15
3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah Indonesia	18
BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH	27
4.1. Ketimpangan Pendapatan	27
4.2. Ketimpangan Wilayah	33
4.3. Analisis Indeks Williamson	37
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1. Kesimpulan	43
5.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

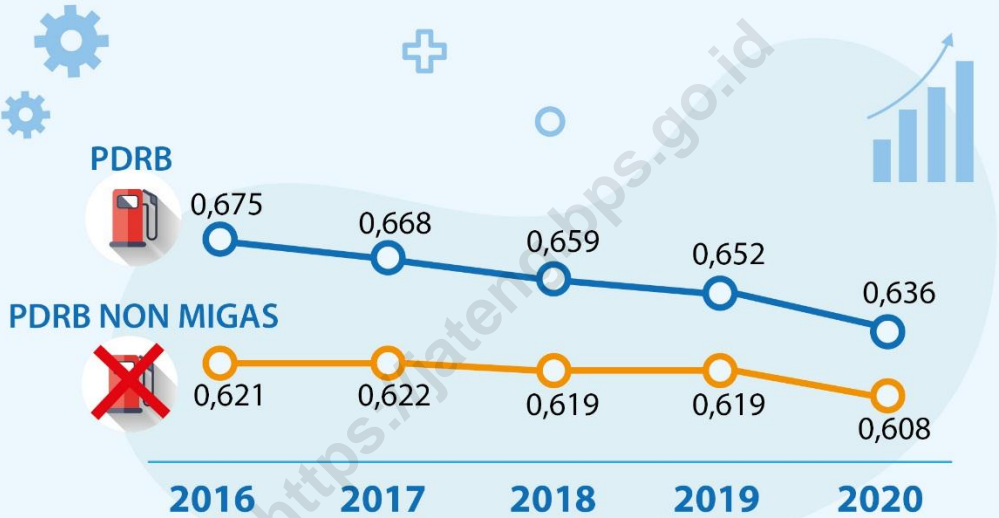
	Halaman
Tabel 4.1. Indeks Williamson Menurut Migas dan Non Migas di Provinsi Jawa Tengah, 2010-2020	39
Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2018-2020	51
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2014-2020	52
Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia, 2016-2021 (Maret)	53
Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota	54
Tabel 5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan	55

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2018-2020.....	20
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020.....	21
Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2020	22
Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2020.....	24
Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2016 – Maret 2020	29
Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2020-2020	30
Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, 2020	30
Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah) 2010-2020	34
Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) 2010-2020	35
Grafik 4.5. Indeks Williamson Menurut PDRB dengan Migas dan Non Migas di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2020.....	41

INFOGRAFIS

INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2020



Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM juga disebabkan faktor eksternal yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Indeks williamson di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 berkisar pada nilai 0,698 sedangkan indeks williamson PDRB non migas mempunyai rata-rata 0,629. Angka indeks ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tinggi. Namun, indeks williamson baik PDRB maupun PDRB non migas terus bergerak menurun.

Disparitas indeks williamson dengan indeks Williamson PDRB non migas semakin mengecil selama 10 tahun terakhir. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil semakin berkembang pesat.

Penciptaan ekonomi riil ini diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju pesat dengan melakukan *sharing*

skill dari daerah yang maju ke daerah tertinggal. Selain itu perlu membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, maka tingkat kesejahteraannya juga semakin baik.

Menurut Lincoln Arsyad (1999), tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain, bahwa apa yang disebut dengan *“trickle down effect”* dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, fenomena

ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti prioritas pembangunan lebih aktif di wilayah perkotaan sedangkan wilayah pedesaan jarang tersentuh. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap perbedaan pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah. Ini menjadi salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah yaitu ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi harus dapat menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja yang makin terbuka bagi penduduk dan masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan harus sikron sehingga angkatan kerja bisa terserap dengan baik. Hal ini memerlukan kebijakan pembangunan yang komprehensif, menyeluruh dan bisa memenuhi kebutuhan wilayahnya. Namun kenyataannya terkadang hasil pembangunan pada masing-masing wilayah menciptakan ketimpangan antar daerah.

Tanpa koordinasi setiap daerah akan mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya. Kemampuan pembangunan wilayah ini dan sumber daya alam yang berbeda-beda antar wilayah akan menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan

pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan adalah *inherent* dengan proses pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992). Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Human Development Index* (HDI), konsumsi rumah tangga per kapita, kontribusi sektoral PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak terhadap tingkat pendapatan daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan. Jawa Tengah mempunyai

kontribusi ekonomi terbesar keempat dari ekonomi nasional sebesar 8,36%. Dalam periode 2015-2019 pembangunan Jawa Tengah terus tumbuh melampaui pertumbuhan nasional. Karakteristik ekonomi Jawa Tengah yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia dan mempunyai keamanan yang kondusif merupakan pasar potensial yang selalu dilirik investor. Tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah sedikit kedodoran karena kasus covid-19 yang tinggi. Kinerja ekonomi berkontraksi hingga -2,65%.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan :

- 1) Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
- 2) Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan
- 3) Untuk mengetahui perbandingan Indeks Williamson Migas dan non Migas

Manfaat :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah
- 2) Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama

1.3. RUANG LINGKUP

Wilayah cakupan dalam penyusunan Indeks Williamson ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Indeks Williamson yang akan disusun meliputi Indeks Williamson migas dan tanpa migas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang adanya ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah tentang ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan

Bab II Metode Penghitungan

Pada bab ini dipaparkan tentang definisi operasional, populasi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bab III Profil Ekonomi Jawa Tengah

Menggambarkan keadaan demografi kabupaten/kota di Jawa Tengah, perekonomian antar kabupaten/kota dan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi ketimpangan pendapatan, analisis tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan pembahasan tentang tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penghitungan serta memberikan beberapa saran terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional yang semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain pertumbuhan, baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibandingkan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya. PDRB riil dicerminkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{\text{PDRBriil}_t - \text{PDRBriil}_{t-1}}{\text{PDRBriil}_{t-1}}$$

Keterangan :

Y_t = Pertumbuhan ekonomi tahun t

PDRB riil = Produk Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

2.2. Gini Rasio

Gini rasio merupakan suatu alat untuk mendeteksi ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang ditandai dengan nilai yang berkisar antara 1-0. Bila Gini Rasio 0, pemerataan sempurna. Interpretasi dari nilai tersebut adalah tiap individu memiliki pendapatan yang sama antar individu satu dengan yang lainnya. Bila Gini Rasio 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna. Interpretasi dari nilai tersebut adalah hanya beberapa kelompok saja yang menerima pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Patokan nilai koefisien :

$< 0,35$ = Tingkat ketimpangan rendah

$0,36 - 0,49$ = Tingkat ketimpangan sedang

$> 0,5$ = Tingkat ketimpangan tinggi

2.3. Ukuran Ketimpangan Antar wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendaparan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\frac{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}{\bar{y}}}}{\bar{y}} \times 100$$

Keterangan :

- IW = Indeks Williamson
- Yi = PDRB Per kapita tiap Kabupaten/kota
- \bar{y} = PDRB Per kapita Provinsi
- ni = Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/kota
- n = Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson : Jika nilai IW menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.

Setelah diperoleh nilai Gini Rasio, dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Gini Rasio terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20-0,35 dinyatakan pemerataan relative tinggi (merata).

Semakin besar nilai indeks, berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai Indeks Williamson $> 0,5$ maka dapat dikatakan pemerataan sangat timpang. Namun apabila nilai Indeks Williamson $< 0,5$ menunjukkan kesenjangan sedang atau pemerataan relatif tinggi (merata)..

BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH

Jawa Tengah sudah dikenal sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi maupun dari sisi demografinya. Secara ekonomi provinsi ini menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Penghubung dari kawasan timur dan barat Indonesia atau sebaliknya. Infrastruktur yang menunjang perekonomian Jawa Tengah sebagai *entry poin* antara lain pelabuhan Tanjung Mas, Bandara Internasional Ahmad Yani yang merupakan sarana dan prasarana lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta lalu lintas penumpang baik dalam maupun luar negeri.

Adanya infrastruktur tersebut mampu mendorong berbagai sektor antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor pertanian, serta jasa hiburan dan rekreasi di Jawa Tengah yang terus berkembang. Beberapa faktor ini dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan rata-rata diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi alam dan lingkungan mempengaruhi budaya dan karakteristik penduduk Jawa Tengah.

3.1. Geografis dan Demografi Jawa Tengah

3.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang cukup strategis untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian, industri, maupun perdagangan. Secara geografis, Jawa Tengah dikelilingi oleh 3 (tiga) provinsi dan 2 (dua) lautan. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah dibatasi oleh

Laut Jawa, sedangkan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara di sebelah barat, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di bagian selatan, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$ LS dan $108^{\circ}30' - 111^{\circ}30'$ BT. Posisi astronomis ini menyebabkan Jawa Tengah memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Secara umum, rata-rata suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara $23,90^{\circ}\text{C} - 28,20^{\circ}\text{C}$, dengan kelembaban berkisar antara 69-83 persen. Sementara itu, rata-rata banyaknya curah hujan berkisar antara 1.024-3.624 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan berkisar 56-142 hari pertahun.

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain karena memiliki curah hujan yang cukup, Jawa Tengah juga memiliki lahan subur yang terbentang di berbagai lereng gunung yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2019, Jawa Tengah memiliki luas lahan sawah sebesar 1,05 juta hektar atau sekitar 14,06 persen dari luas total lahan sawah di Indonesia. Selain menjadi provinsi dengan luas lahan sawah terbesar kedua setelah Jawa Timur, Jawa Tengah juga menjadi wilayah pemasok tanaman hasil pertanian yang utama bagi Indonesia, terutama padi dan palawija.

Secara administratif, luas Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 32.544,12 km² atau sekitar seperempat luas wilayah Pulau Jawa (BPS Jawa Tengah, 2018). Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar 2.138,51 km²,

sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Magelang, yaitu seluas 18,12 km². Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami pemekaran. Dari hasil Podes 2018 terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten, dengan jumlah kecamatan sebanyak 573 kecamatan. Selain itu, hasil Podes 2018 juga memperlihatkan bahwa jumlah wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa tercatat sebanyak 7.809 desa dan 750 kelurahan. Dari total 7.809 desa tersebut, sebanyak 6.632 desa (84,93 persen) terkategori sebagai desa berkembang dan sebanyak 1.133 desa (14,51 persen) terkategori sebagai desa mandiri. Sisanya, sebanyak 44 desa (0,56 persen) masih terkategori sebagai desa tertinggal (BPS, 2018). Kategorisasi ini didasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung oleh BPS. IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa yang disusun berdasarkan 5 dimensi, yaitu; Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Seperti halnya wilayah lainnya yang berada pada jalur cincin api dunia (*ring of fire*), Jawa Tengah memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Slamet, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Gunung Ungaran. Keberadaan gunung aktif ini menjadikan daerah di sekitar lereng gunung menjadi wilayah yang cukup subur untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Slamet misalnya, terbentang lahan pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan. Pun demikian di lereng gunung Merapi, yang juga menghasilkan mineral alam

berupa batu pasir yang sangat berkualitas. Bahkan, wilayah lereng gunung Merapi menjadi salah satu pemasok batu pasir yang utama di Jawa Tengah.

3.1.2. Demografi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebanyak 32.443.899 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 orang. Jumlah ini bertambah sekitar 4 juta orang apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kota Semarang memiliki penduduk sebanyak 1,65 juta (4,53%) menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kota Magelang dengan penduduk sebanyak 121,53 ribu (0,33%) menjadi Kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Jawa Tengah.

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 18,75 juta atau 69,43% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sisanya adalah penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Dari total penduduk angkatan kerja, sebanyak 94% mempunyai status bekerja. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja pada sektor pertanian (26,28%). Selain pertanian, sektor industri dan perdagangan juga mewarnai sumber ekonomi penduduk Jawa Tengah dengan besaran masing-masing 20,64% dan 19,03%.

3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah di Indonesia

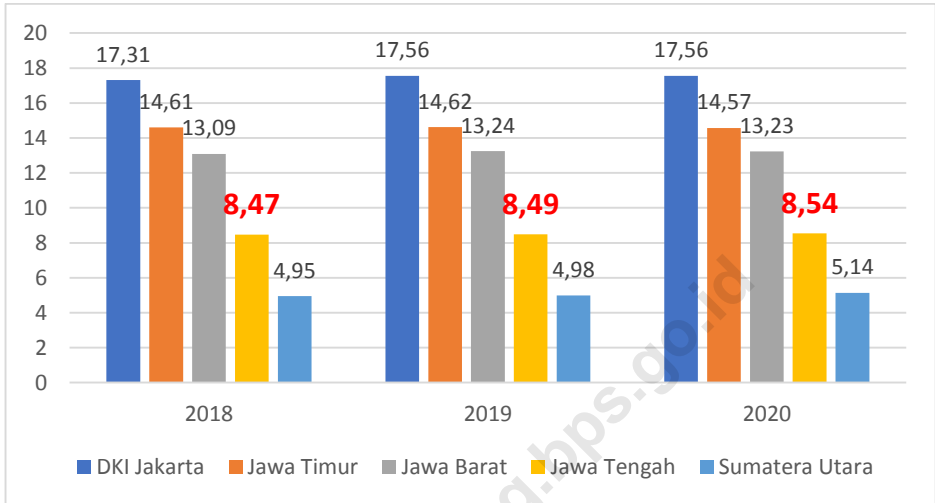
Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat potensial dengan karakteristik ekonomi yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional. Pertama,

provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia ini berpotensi menarik investor. Kedua, Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi nasional keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 8,54 persen pada tahun 2020.

Pencapaian pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir sebelum pandemi telah memberi hasil positif pada level nasional. Sektor-sektor unggulan yang menyumbang pembangunan nasional adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Sebagai provinsi penyumbang ekonomi keempat di Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah RI bahkan mengeluarkan Perpres No.79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan yang ada di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%. Walaupun pembangunan saat ini terhambat karena adanya pandemi Covid19 pada tahun 2020.

Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2018-2020



Sumber : www.bps.go.id

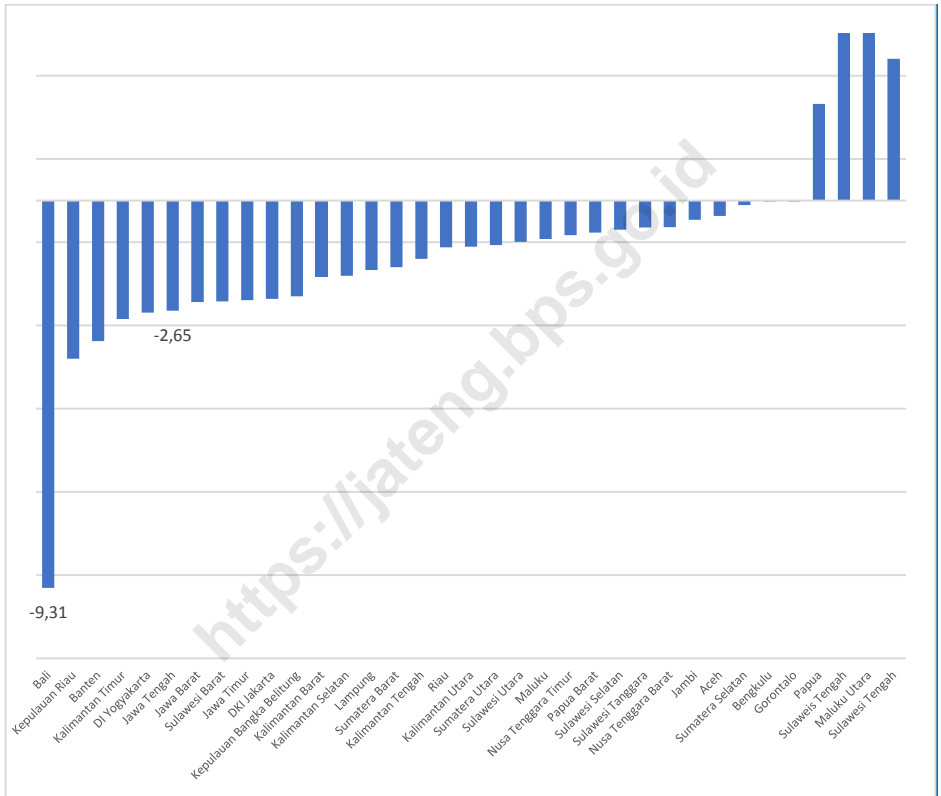
Ketiga, pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi menandakan ada pergerakan pembangunan pada wilayah tersebut.

Perekonomian suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Dalam peningkatan faktor produksi ini yang kemudian disebut pertumbuhan ekonomi. Jawa Tengah dalam periode 2014-2019 mempunyai pertumbuhan ekonomi diatas 4% dan kinerja ekonomi di atas kinerja ekonomi nasional.

Tahun 2020 merupakan tahun pandemi pada hampir semua negara. Penularan kasus covid19 yang berdampak kematian membuat semua orang seakan berhenti beraktivitas diluar seperti biasa. Semua pergerakan dibatasi sehingga berdampak pada hancurnya perekonomian. Indonesia juga mengalami hal sama.

Hampir semua provinsi di Indonesia kinerja ekonominya terkontraksi kecuali Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua.

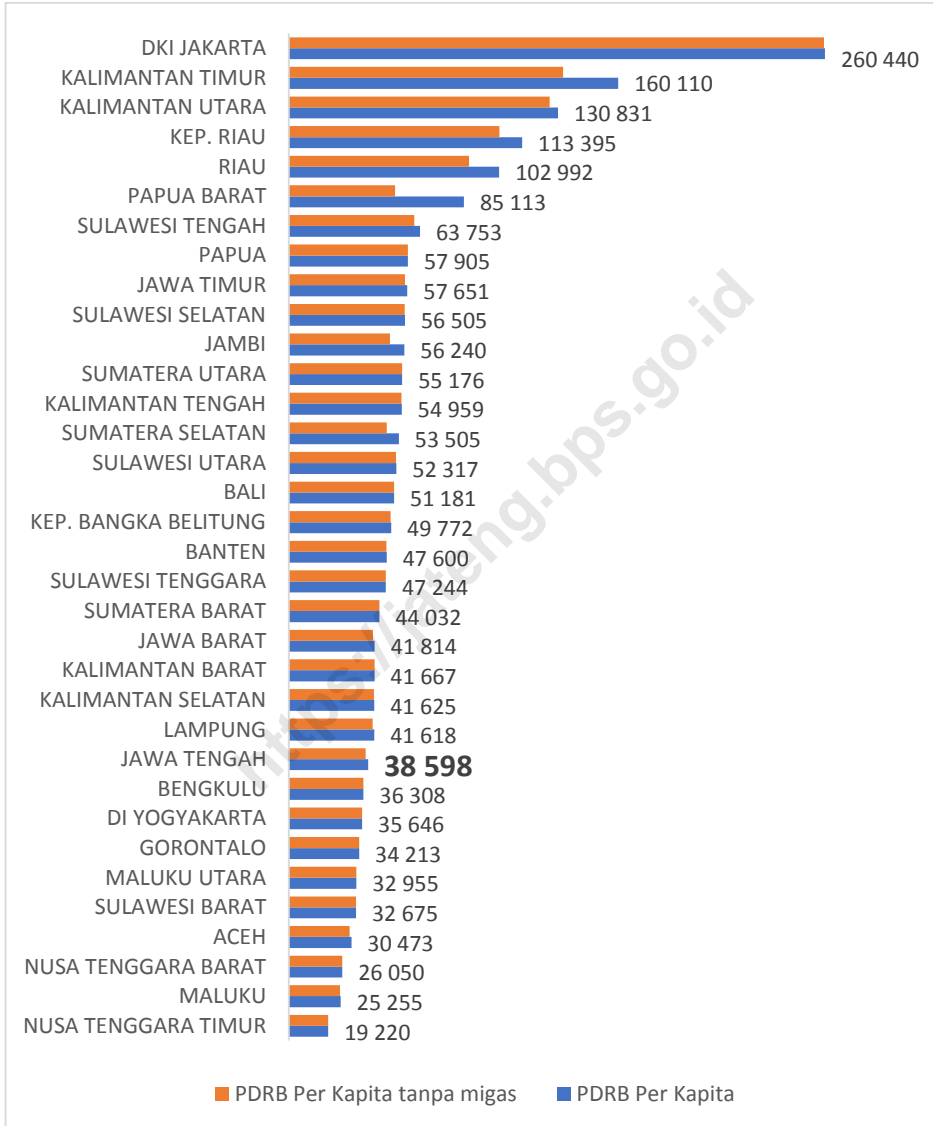
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020



Sumber : www.bps.go.id

Jawa Tengah juga mengalami kontraksi hingga -2,65% dan lebih rendah dari nasional yang terkontraksi sebesar -2,07%. Kasus covid19 yang terjadi di Jawa Tengah cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Sehingga berbagai kebijakan pembatasan aktivitas ketat dilakukan oleh pemerintah. Dari PSBB hingga PPKM mikro untuk menekan penyebaran virus Covid19 lebih banyak lagi Hal ini tentu berdampak pada kinerja ekonomi yang mengalami kemunduran.

Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2020



Sumber : www.bps.go.id

Keempat, PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui total PDRB suatu daerah dibagi jumlah

penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

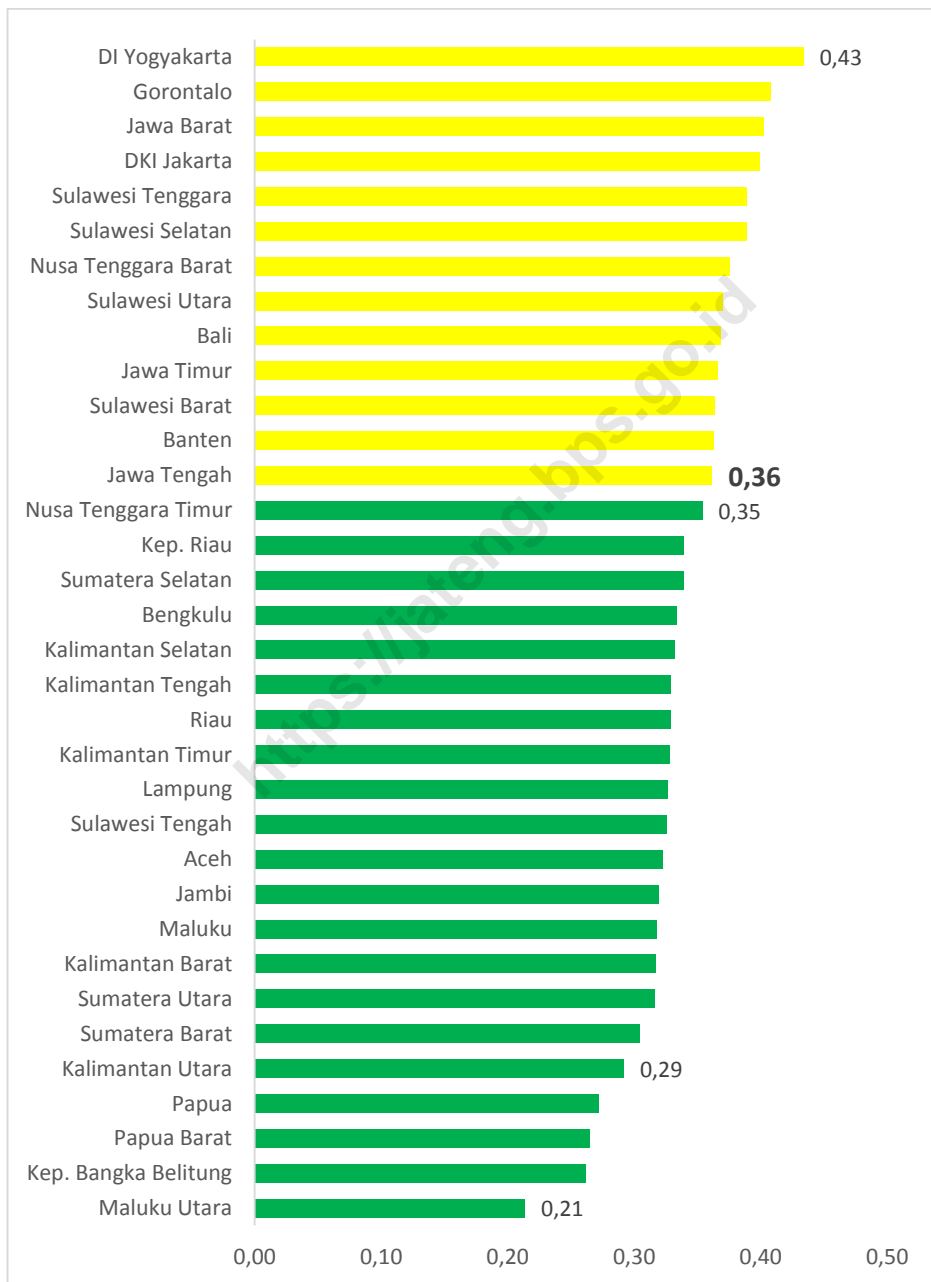
Jawa Tengah mempunyai pendapatan per kapita sebesar Rp 38,60 juta. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai Rp 56,94 juta. Untuk peringkat antar provinsi, PDRB per kapita Jawa Tengah berada pada posisi 25 dari 34 provinsi di Indonesia.

Nominal PDRB per kapita ini belum bisa menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil. Apalagi untuk wilayah penghasil migas, pasti mempunyai PDRB per kapita yang tinggi walaupun secara riil masyarakat di wilayahnya tidak menikmati ekonomi migas secara keseluruhan.

Disparitasnya PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi yang mempunyai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia cukup jauh. Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia sebesar 260,44 juta/penduduk. Demikian juga dengan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan Riau yang mempunyai pendapatan per kapita di atas 100 juta/penduduk.

Dari sisi kaca mata PDRB per kapita, sudah bisa dibandingkan terjadi kesenjangan antar wilayah yang dipengaruhi oleh proses pembangunan. Selain provinsi DKI Jakarta yang menjadi ibukota dengan segala fasilitas yang menjadi daya magnet untuk mengadu nasib, provinsi yang memiliki sumber daya alam migas juga mempunyai PDRB yang tinggi dibandingkan dengan provinsi yang tidak memiliki.

Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2020



Sumber : www.bps.go.id

Kelima, Gini Rasio untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Provinsi DI Yogyakarta mempunyai indeks gini rasio tertinggi se-Indonesia sebesar 0,42. Sedangkan provinsi dengan Gini Rasio terendah berada di Provinsi Maluku Utara dengan Gini Rasio 0,21.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Gini Rasio Jawa Tengah berada pada peringkat 22 dari 34 provinsi. Ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah masih pada kategori sedang. Posisi Indeks Gini Rasio Jawa Tengah masih lebih rendah daripada Indonesia. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah masih lebih baik daripada Indonesia. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,372 pada tahun 2020 masih dalam kategori tingkat ketimpangan sedang.

BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH

Ketimpangan adalah tema yang menarik perhatian dan menjadi isu terkini. Ketimpangan sebagai penanda adanya permasalahan, dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.

Kategori ketimpangan ada dua yaitu : *pertama*, ketimpangan hasil (ketimpangan pendapatan). Kedua, ketimpangan ketidaksetaraan kesempatan (ketimpangan wilayah karena proses dari pembangunan sumber daya alam dan infrastruktur).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Sedangkan ketimpangan kesempatan dapat diukur dengan Pendapatan per kapita dan Indeks Williamson yang mencerminkan kondisi kesenjangan wilayah.

4.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah antara pendapatan masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjadi *gap*. Jika *gap* ini semakin tinggi yang terjadi adalah tidak kondusifnya suatu wilayah karena ada jurang yang sangat dalam memisahkan si miskin dan si kaya.

Studi yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan stabilitas makroekonomi (IMF, 2015). Selain itu, IMF juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan memicu terjadinya konflik. Kondisi tersebut

menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak negatif terhadap investasi pembangunan. Lebih lanjut, dengan adanya ketimpangan maka pemerintah dalam menghadapi goncangan ekonomi juga menjadi semakin sulit karena masyarakat yang relatif heterogen.

4.1.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah

Selama periode 2016 – 2020, angka gini rasio untuk Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Posisi gini rasio Jawa Tengah berada pada kategori ketimpangan sedang dalam lima tahun terakhir. Walaupun dalam perjalanannya menunjukkan pola yang berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Hal tersebut berbeda dengan angka gini rasio rata-rata Indonesia yang menunjukkan penurunan yang konsisten.

Pada tahun 2016, angka gini rasio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366. Sementara itu pada saat yang sama angka gini rasio Indonesia sebesar 0,397. Selanjutnya pada tahun 2016, angka gini rasio Jawa Tengah dan Indonesia mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,365 dan 0,393. Namun pada tahun 2018, angka gini rasio Jawa Tengah meningkat menjadi 0,378 sementara angka gini rasio Indonesia justru mengalami penurunan menjadi 0,389. Setahun kemudian, angka gini rasio Jawa Tengah dan Indonesia kembali menurun dengan masing-masing 0,360 dan 0,382. Pada kondisi Covid19 atau terjadi tahun 2020, gini rasio Jawa Tengah meningkat kembali menjadi 0,362 sedangkan posisi gini rasio Indonesia konsisten menurun menjadi 0,381.

Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2016 – Maret 2020



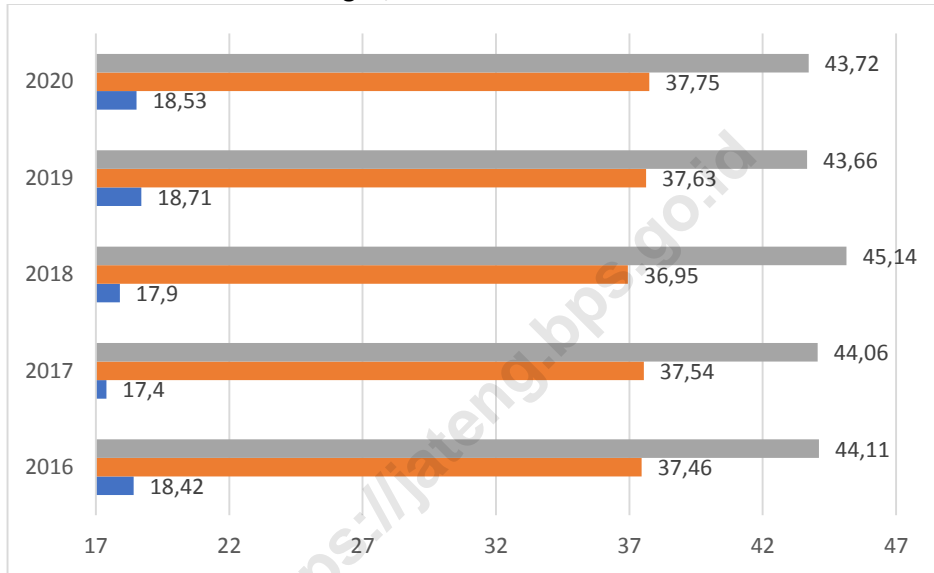
Angka gini rasio Jawa Tengah yang fluktuatif menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan tingkat pengeluaran antara kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa hasil pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di Jawa Tengah.

4.1.2. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur ketimpangan penduduk, Bank Dunia menggunakan indikator yang didasarkan pada distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan. Menurut ukuran tersebut, tingkat ketimpangan termasuk tinggi jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan kurang dari 12% dari seluruh pendapatan. Jika proporsi pendapatan dari 40% kelompok terendah sebanyak 12% – 17%, maka termasuk ketimpangan pendapatan

sedang/menengah. Adapun ketimpangan dianggap rendah jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan lebih dari 17% dari total pendapatan.

Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2016-2020



Sumber : www.bpsjateng.go.id

Tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah yaitu sebesar 18,53%. Kue pembangunan tersebut dinikmati masyarakat 40% golongan berpendapatan terendah. Walaupun demikian, kondisi kesenjangan ini hanya sedikit berada di atas ambang batas kategori. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang masuk kategori rendah pada tahun 2020 masih perlu diwaspadai karena masih rentan masuk dalam kategori sedang/menengah.

Hal lain yang dapat diamati dari hasil perhitungan kriteria Bank Dunia tersebut adalah kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20% penduduk

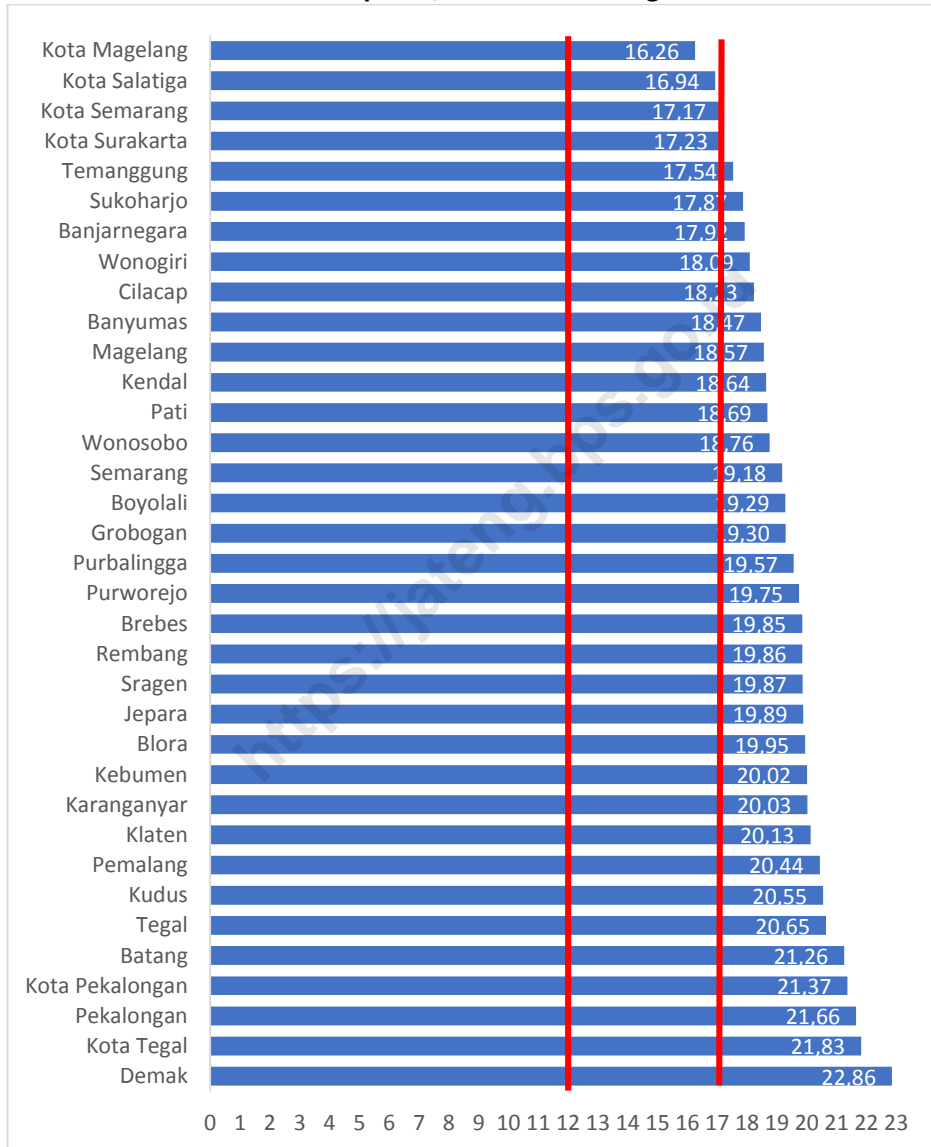
berpenghasilan teratas melebihi dua kali lipat dari 40% penduduk dengan penghasilan terendah. Tabel 4.2. menjelaskan dominasi kelompok penduduk 20% pengeluaran teratas masih sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Penerimaan golongan ini dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi. Dari yang menguasai 45.14% di tahun 2018, kemudian turun menjadi 43,66% pada tahun 2019 dan kembali naik menjadi 43,72% dari total pengeluaran masyarakat Jawa Tengah.

Meskipun berfluktuasi namun terlihat adanya kecenderungan semakin meningkat persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah. Dengan semakin meningkatnya persentase pengeluaran kelompok penduduk ini, hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya tingkat ketimpangan di Jawa Tengah.

Jika diamati dari grafik 4.2. terdapat 4 kota di Jawa Tengah berada di posisi 4 besar ketimpangan pendapatan. Karena *gap* lapisan penduduk di perkotaan lebih beragam dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Ekonomi di kabupaten cenderung dengan ekonomi kerakyarakat sehingga hasil pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Ada 2 kota di Jawa Tengah yang ketimpangannya sangat rendah. Kedua kota tersebut adalah Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Dua kota yang letaknya berada di pantura jika diamati sebagian besar ekonominya ditopang oleh industri pengolahan yang didominasi oleh usaha rumah tangga.

Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2020



Sumber : www.bpsjateng.go.id

Kabupaten Demak mempunyai ketimpangan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan 40% penduduk golongan pengeluaran terendah menikmati 22,86% dari total pengeluaran.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah fluktuasi yang terjadi baik pada angka gini rasio maupun ukuran Bank Dunia. Masih berfluktuasinya angka gini rasio dan persentase pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan mempunyai potensi yang besar untuk meningkat. Diperlukan program dan kebijakan yang lebih strategis agar ketimpangan dapat diturunkan secara lebih konsisten.

4.2. Ketimpangan Wilayah

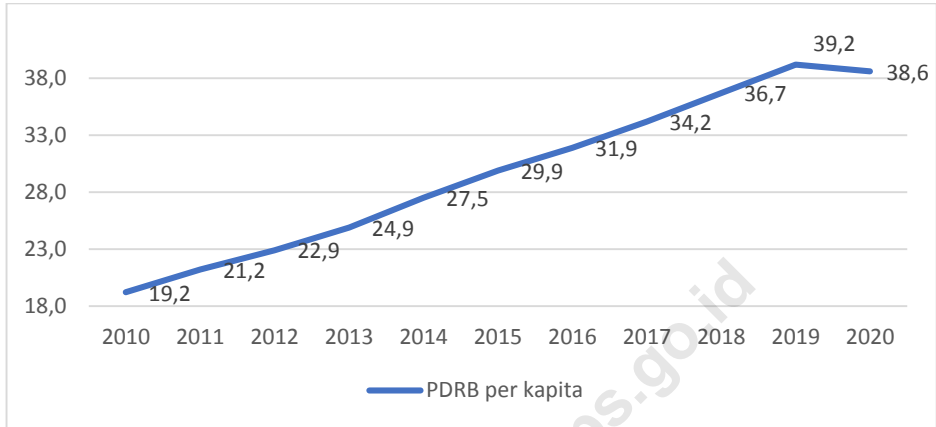
Salah satu permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan di Indonesia adalah permasalahan mengenai ketimpangan wilayah atau kesenjangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Salah satu provinsi yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Ketimpangan wilayah ini dapat diukur dengan pendapatan per kapita dan Indeks Williamson.

4.2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah

PDRB per kapita Jawa Tengah telah naik tajam selama satu dekade terakhir. Walaupun pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan yang disebabkan pandemi covid19.

Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2010-2020



Sumber : www.bpsjateng.go.id

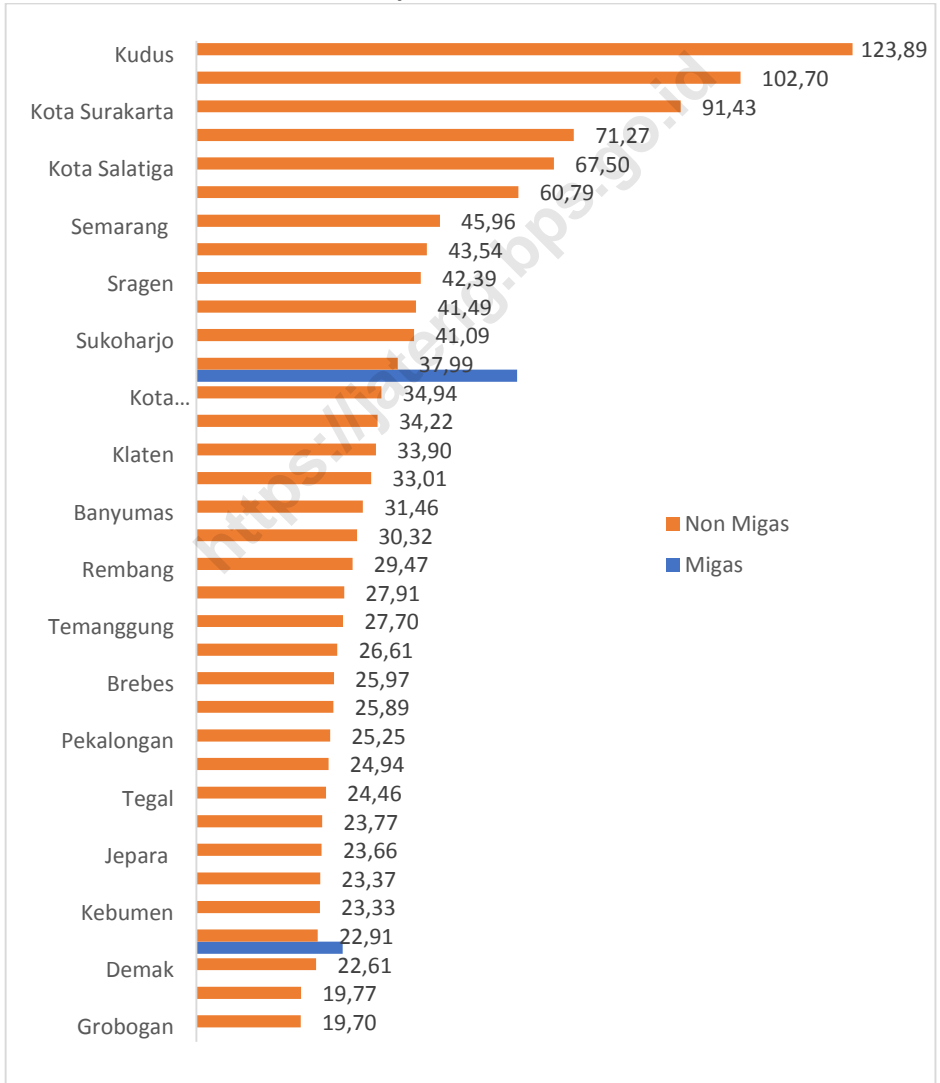
Pada gambar 4.2. dengan menggunakan PDRB per kapita harga berlaku 2020 Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2010-2019 angka PDRB per kapita mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 19,2 juta merupakan angka PDRB per kapita terendah, dan pada tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 39,2 juta merupakan angka PDRB per kapita tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi Rp 38,6 juta karena terjadi pandemi.

Namun demikian peningkatan PDRB per kapita ini tidak bisa langsung dianalisis sebagai peningkatan kesejahteraan. Perlu dilihat pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

4.2.2. Analisis PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

Untuk melihat ketimpangan antar wilayah pada grafik 4.1. adalah gambaran pendapatan per kapita antar wilayah di Jawa Tengah.

Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah (juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Data menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah diatas Rp 100 juta per kapita adalah kabupaten Kudus sebesar Rp 123,89 juta dan Kota Semarang sebesar Rp 102,70 juta. Kabupaten Kudus menonjol pada industri pengolahan dengan kontribusi industrinya mencapai 80,97% terhadap total PDRB Kabupaten Kudus. Sedangkan sumbangan industri pengolahan Kabupaten Kudus terhadap total industri pengolahan di Jawa Tengah tertinggi dengan kontribusi sebesar 18,99%.

Kalau dilihat dari letak geografisnya daerah-daerah yang mengelilingi Kabupaten Kudus mempunyai PDRB per kapita yang rendah walaupun sumber daya alam di daerah-daerah tersebut tidak banyak berbeda. Seperti halnya Kabupaten Kudus yang secara geografis dikelilingi oleh kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Dari keempat kabupaten, hanya Kabupaten Pati yang memiliki PDRB per kapita cukup tinggi. Sedangkan tiga kabupaten lainnya mempunyai PDRB per kapita yang rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Kota Semarang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga perekonomiannya sangat maju dan menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa dan juga tempat wisata. Kalau dilihat dari letak geografisnya beberapa kota yang menjadi satelit seperti kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal PDRB per kapita cukup tinggi walaupun masih kalah dibandingkan dengan Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal.

Grafik 4.1. menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB per kapita tertinggi yang diduduki oleh kabupaten Kudus dengan nilai sebesar Rp 123,89 juta. Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Grobogan merupakan PDRB

yang terendah, hanya sebesar Rp 19,70 juta. Perbedaan akan sumber daya alam dan juga infrastruktur memang sangat mempengaruhi pendapatan setiap daerah di Jawa Tengah. Dilihat dari ketimpangan PDRB per kapita dari yang tertinggi hingga terendah sangat jauh perbedaannya mencapai 104,19 juta dan ini masih jauh dari rata-rata PDRB per kapita provinsi yang sebesar 38,49 juta rupiah.

Dengan ketimpangan PDRB per kapita cukup jauh maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Jika proporsi pengeluaran 40% masyarakat golongan bawah kecil maka, ketimpangan pembangunan cukup tinggi.

4.3. Analisis Indeks Williamson

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh suatu wilayah telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, heterogenitas karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah.

Data yang diperlukan untuk mengukur Indeks Williamson adalah dengan PDRB per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota. Bila indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata, sedangkan semakin jauh dari 0 (nol) artinya sangat timpang.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kebijakan pembangunan di provinsi Jawa tengah selama 2010-2020 dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan semakin melebar atau semakin merata dapat dilihat pada grafik 4.3. Pengukuran Indeks Williamson ini membedakan PDRB total dengan migas dan PDRB tanpa migas.

Indeks Williamson dengan total PDRB dengan migas di Provinsi Jawa Tengah 2010-2020 mencapai 0,698. Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun 2020 yang mencapai 0,636 dari sebelumnya 0,777 pada tahun 2010. Namun, ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan pembangunan tinggi karena angka indeksnya diatas 0,5.

Dibandingkan angka Indeks Williamson, indeks williamson PDRB non migas tingkat ketimpangan lebih rendah. PDRB non migas adalah cerminan pembangunan riil yang kinerja ekonominya berasal dari masyarakat. Sedangkan migas, pembangunan ekonominya mengikutsertakan SDA migas yang dimiliki oleh suatu wilayah dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena SDA migas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

Tabel 4.1. Indeks Williamson Menurut PDRB dan non Migas di Provinsi Jawa Tengah 2010-2020

Tahun	PDRB	PDRB Non Migas
2010	0,777	0,652
2011	0,747	0,639
2012	0,732	0,641
2013	0,723	0,638
2014	0,713	0,639
2015	0,692	0,625
2016	0,675	0,621
2017	0,668	0,622
2018	0,659	0,619
2019	0,652	0,619
2020	0,636	0,608
Rata-rata	0,698	0,629

Sumber : BPS data diolah

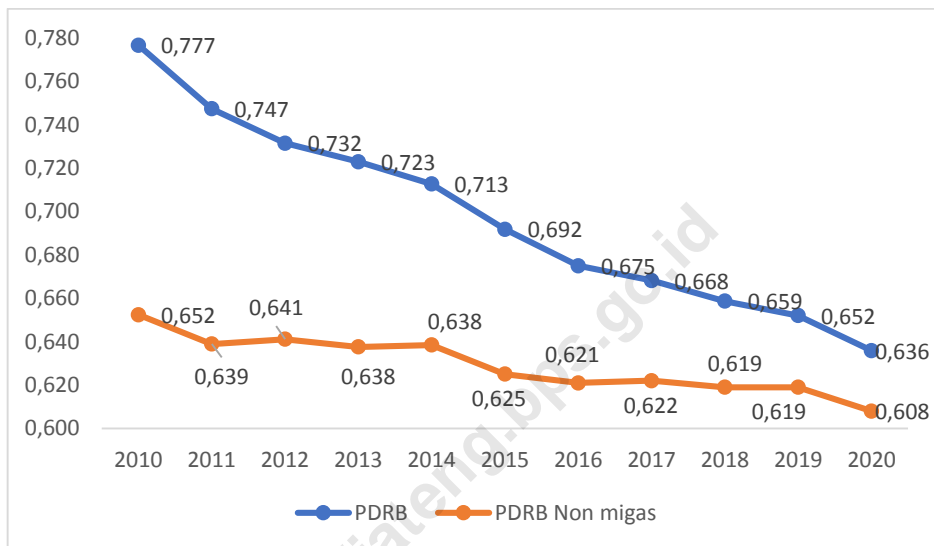
Rata-rata indeks williamson PDRB non migas selama tahun 2010-2020 berkisar pada nilai 0,629. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,652 dan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 0,608. Indeks williamson PDRB non migas juga masih tergolong ketidakmerataan tinggi.

Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya. Seperti Kabupaten Kudus yang memiliki sejumlah perusahaan besar nasional yang beroperasi di daerah tersebut. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan antar pulau dan bandara internasional, sehingga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Disisi lain Kabupaten Grobogan mempunyai PDRB per kapita terendah. Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini merupakan usaha keras pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi penanam modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Grobogan sehingga bisa menambah nilai tambah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah bruto tersebut akan menekan ketimpangan di Jawa Tengah.

Faktor perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik akan menyebabkan kawasan menjadi kawasan ekonomi yang strategis. Merujuk pada peta wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki menyebabkan ketimpangan-ketimpangan di sektor-sektor tertentu. Ketimpangan tersebut mengakibatkan arus urbanisasi meningkat, ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan SDM, ketidakmerataan penggunaan teknologi, dan aksesibilitas yang kurang memadai.

Grafik 4.6. Indeks Williamson Menurut PDRB dan PDRB Non Migas di Provinsi Jawa Tengah 2010-2020



Sumber : BPS data diolah

Jika diamati dari grafik 4.3. disparitas indeks williamson dan indeks wiiliamson non migas semakin mengecil. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat dan mampu bersaing dengan ekonomi migas.

Ini suatu pertanda yang baik, karena kinerja ekonomi riil lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Permasalahan yang masih menjadi PR pemerintah adalah menekan ketimpangan pembangunan. Sehingga pembangunan riil ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Jawa Tengah.

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketimpangan jadi penanda adanya bermasalah dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.
2. Kategori ketimpangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - Ketimpangan hasil : ketimpangan pendapatan/pengeluaran
 - Ketidaksetaraan kesempatan : ketimpangan wilayah karena infrastruktur dan sumber daya alam
3. Provinsi Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.
4. Kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional tahun 2020 sebesar 8,54%.
5. PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 24 nasional dan dibawah rata-rata PDRB per kapita Indonesia
6. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tahun 2020, kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah berkontraksi -3,27. Pertumbuhan ekonomi ini berada di bawah nasional.

7. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,372 tahun 2020 masih dalam kategori tingkat ketimpangan sedang. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah masih merata.
8. Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 19,2 juta merupakan angka PDRB per kapita terendah, dan pada tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 39,2 juta merupakan angka PDRB per kapita tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi Rp 38,6 juta karena terjadi pandemi.
9. PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Tengah tertinggi Kabupaten Kudus dengan Rp 123,89 juta dan terendah Kabupaten Grobogan sebesar Rp 19,70 juta.
10. Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, Kota Magelang dan Kota Salatiga masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
11. Indeks Williamson Jawa Tengah masih tergolong ketidakmertaan tinggi. Namun dalam periode 2010-2020 semakin menurun ketimpangannya.
12. Disparitas indeks williamson dan indeks Williamson PDRB non migas semakin mengecil. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat dan mampu bersaing dengan ekonomi migas.

5.2. Saran

1. Kebijakan pembangunan memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Bagi kabupaten/kota yang masuk dalam daerah maju adalah memberikan bantuan bagi daerah tertinggal berupa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (menciptakan *humancapital*), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi kewirausahaan. Kebanyakan kabupaten/kota yang sudah maju dan berkembang cepat mengandalkan sektor industri dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga *sharing skill* ke daerah tertinggal dengan menularkan keterampilan yang dimiliki.
2. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi dengan membuat perencanaan pembangunan terstruktur untuk meminimalkan ketimpangan.
3. Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.
4. Pengembangan sektor potensi pada daerah tertinggal dan memasarkan produk-produknya ke luar daerah.

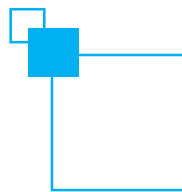
Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17, I, 2002, 27-45
- BPS Jawa Tengah. 2021. Beberapa Indikator Sosial Ekonomi BPS Provinsi Jawa Tengah Edisi Sepetember 2021. Semarang
- BPS Jawa Tengah. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Semarang
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta



Lampiran

<https://jateng.bps.go.id>



Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2018-2020

Provinsi	2018	2019	2020
DKI JAKARTA	247 678,50	266 794,00	260 440,10
KALIMANTAN TIMUR	174 164,80	175 245,90	160 109,80
KALIMANTAN UTARA	119 413,90	130 067,00	130 831,10
KEP. RIAU	116 461,40	122 237,70	113 394,70
RIAU	110 384,90	109 092,90	102 291,70
PAPUA BARAT	84 958,03	87 899,52	85 113,41
SULAWESI TENGAH	55 518,66	60 818,17	63 752,76
PAPUA	63 385,68	56 078,23	57 905,09
JAWA TIMUR	55 410,61	59 089,96	57 650,51
INDONESIA	55 992,14	59 060,10	56 938,72
SULAWESI SELATAN	52 642,08	56 977,52	56 505,19
JAMBI	58 224,89	59 885,54	56 240,42
SUMATERA UTARA	51 427,49	54 908,58	55 176,05
KALIMANTAN TENGAH	52 107,23	55 251,79	54 959,31
SUMATERA SELATAN	50 104,67	53 554,10	53 505,42
SULAWESI UTARA	48 105,41	51 927,61	52 317,20
BALI	54 433,46	58 137,73	51 180,81
KEP. BANGKA BELITUNG	50 081,95	50 911,43	49 772,29
BANTEN	48 370,15	51 182,45	47 599,84
SULAWESI TENGGARA	44 492,09	47 777,79	47 243,65
SUMATERA BARAT	42 802,66	45 207,45	44 031,59
JAWA BARAT	40 272,64	43 069,45	41 814,42
KALIMANTAN BARAT	38 814,73	41 851,45	41 677,07
KALIMANTAN SELATAN	41 046,28	42 543,96	41 624,53
LAMPUNG	39 716,46	42 228,59	41 617,57
JAWA TENGAH	36 770,96	39 217,68	38 597,52
BENGKULU	33 822,13	36 202,48	36 307,97
DI YOGYAKARTA	34 136,93	36 708,48	35 646,18
GORONTALO	31 827,62	34 211,29	34 213,45
MALUKU UTARA	29 586,12	31 609,31	32 955,45
SULAWESI BARAT	32 059,09	33 586,80	32 675,04
ACEH	29 521,25	30 562,54	30 472,64
NUSA TENGGARA BARAT	24 705,97	26 116,83	26 049,87
MALUKU	24 268,62	25 599,14	25 254,82
NUSA TENGGARA TIMUR	18 417,54	19 560,87	19 220,10

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2014-2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
Sumatera Barat	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,6
Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,12
Jambi	4,37	4,6	4,69	4,37	-0,46
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Kep. Bangka Belitung	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,3
Kep. Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,8
DKI Jakarta	5,87	6,2	6,11	5,82	-2,36
Jawa Barat	5,66	5,33	5,65	5,07	-2,44
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,3	5,4	-2,65
Di Yogyakarta	5,05	5,26	6,2	6,59	-2,69
Jawa Timur	5,57	5,46	5,47	5,52	-2,39
Banten	5,28	5,75	5,77	5,29	-3,38
Bali	6,33	5,56	6,31	5,6	-9,31
Nusa Tenggara Barat	5,81	0,09	-4,5	3,9	-0,64
Nusa Tenggara Timur	5,12	5,11	5,11	5,24	-0,83
Kalimantan Barat	5,2	5,17	5,07	5,09	-1,82
Kalimantan Tengah	6,35	6,73	5,61	6,12	-1,4
Kalimantan Selatan	4,4	5,28	5,08	4,08	-1,81
Kalimantan Timur	-0,38	3,13	2,64	4,74	-2,85
Kalimantan Utara	0,55	6,8	5,36	6,9	-1,11
Sulawesi Utara	6,16	6,31	6	5,65	-0,99
Sulawesi Tengah	9,94	7,1	20,6	8,83	4,86
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,7
Sulawesi Tenggara	6,51	6,76	6,4	6,5	-0,65
Gorontalo	6,52	6,73	6,49	6,4	-0,02
Sulawesi Barat	6,01	6,39	6,26	5,67	-2,42
Maluku	5,73	5,82	5,91	5,41	-0,92
Maluku Utara	5,77	7,67	7,86	6,1	4,92
Papua Barat	4,52	4,02	6,25	2,66	-0,77
Papua	9,14	4,64	7,32	-15,75	2,32
Indonesia	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia,2016-2021 (Maret)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	0,333	0,329	0,325	0,320	0,323
Sumatera Utara	0,319	0,315	0,318	0,320	0,316
Sumatera Barat	0,331	0,318	0,321	0,310	0,305
Riau	0,347	0,325	0,327	0,330	0,329
Jambi	0,349	0,335	0,334	0,320	0,320
Sumatera Selatan	0,348	0,361	0,358	0,330	0,339
Bengkulu	0,357	0,351	0,362	0,340	0,334
Lampung	0,364	0,334	0,346	0,330	0,327
Kep. Bangka Belitung	0,275	0,282	0,281	0,270	0,262
Kep. Riau	0,354	0,334	0,330	0,340	0,339
DKI Jakarta	0,411	0,413	0,394	0,390	0,399
Jawa Barat	0,413	0,403	0,407	0,400	0,403
Jawa Tengah	0,366	0,365	0,378	0,360	0,362
DI Yogyakarta	0,420	0,432	0,441	0,420	0,434
Jawa Timur	0,402	0,396	0,379	0,370	0,366
Banten	0,394	0,382	0,385	0,370	0,363
Bali	0,366	0,384	0,377	0,370	0,369
Nusa Tenggara Barat	0,359	0,371	0,372	0,380	0,376
Nusa Tenggara Timur	0,336	0,359	0,351	0,360	0,354
Kalimantan Barat	0,341	0,327	0,339	0,330	0,317
Kalimantan Tengah	0,330	0,343	0,342	0,340	0,329
Kalimantan Selatan	0,332	0,347	0,344	0,330	0,332
Kalimantan Timur	0,315	0,330	0,342	0,330	0,328
Kalimantan Utara	0,300	0,308	0,303	0,300	0,292
Sulawesi Utara	0,386	0,396	0,394	0,370	0,370
Sulawesi Tengah	0,362	0,355	0,346	0,330	0,326
Sulawesi Selatan	0,426	0,407	0,397	0,390	0,389
Sulawesi Tenggara	0,402	0,394	0,409	0,400	0,389
Gorontalo	0,419	0,430	0,403	0,410	0,408
Sulawesi Barat	0,364	0,354	0,370	0,370	0,364
Maluku	0,348	0,343	0,343	0,320	0,318
Maluku Utara	0,286	0,317	0,328	0,310	0,308
Papua Barat	0,373	0,390	0,394	0,390	0,382
Papua	0,390	0,397	0,384	0,390	0,392
Indonesia	0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2010 dan 2020

Kabupaten/Kota	2010	2020
Cikacap	1 642 107	1 944 857
Banyumas	1 554 527	1 776 918
Purbalingga	848 952	998 561
Banjarnegara	868 913	1 017 767
Kebumen	1 159 926	1 350 438
Purworejo	695 427	769 880
Wonosobo	754 883	879 124
Magelang	1 181 723	1 299 859
Boyolali	930 531	1 062 713
Klaten	1 130 047	1 260 506
Sukoharjo	824 238	907 587
Wonogiri	928 904	1 043 177
Karanganyar	813 196	931 963
Sragen	858 266	976 951
Grobogan	1 308 696	1 453 526
Blora	829 728	884 333
Rembang	591 359	645 333
Pati	1 190 993	1 324 188
Kudus	777 437	849 184
Jepara	1 097 280	1 184 947
Demak	1 055 579	1 203 956
Semarang	930 727	1 053 094
Temanggung	708 546	790 174
Kendal	900 313	1 018 505
Batang	706 764	801 718
Pekalongan	838 621	968 821
Pemalang	1 261 353	1 471 489
Tegal	1 394 839	1 596 996
Brebes	1. 33 869	1 978 759
Kota Magelang	118 227	121 526
Kota Surakarta	499 337	522 364
Kota Salatiga	170 332	192 322
Kota Semarang	1 555 984	1 653 524
Kota Pekalongan	281 434	307 150
Kota Tegal	239 599	273 825
Jawa Tengah	32 382 657	36 516 035

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan 2020

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
1. Cilacap	888 218	90,90	421 987	1 310 205	67,79
2. Banyumas	877 555	94,00	438 944	1 316 499	66,66
3. Purbalingga	500 261	93,90	215 498	715 759	69,89
4. Banjarnegara	495 167	94,14	215 327	710 494	69,69
5. Kebumen	633 687	93,93	276 427	910 114	69,63
6. Purworejo	394 887	95,96	168 842	563 729	70,05
7. Wonosobo	428 178	94,63	172 672	600 850	71,26
8. Magelang	774 364	95,73	236 501	1 010 865	76,60
9. Boyolali	580 232	94,72	192 234	772 466	75,11
10. Klaten	641 245	94,54	297 227	938 472	68,33
11. Sukoharjo	488 250	93,07	222 055	710 305	68,74
12. Wonogiri	582 733	95,73	197 444	780 177	74,69
13. Karanganyar	515 145	94,04	185 212	700 357	73,55
14. Sragen	481 762	95,25	222 200	703 962	68,44
15. Grobogan	744 405	95,50	322 464	1 066 869	69,77
16. Blora	492 071	95,11	192 285	684 356	71,90
17. Rembang	330 783	95,17	176 775	507 558	65,17
18. Pati	637 950	95,26	361 223	999 173	63,85
19. Kudus	512 319	94,47	175 388	687 707	74,50
20. Jepara	679 907	93,30	292 469	972 376	69,92
21. Demak	619 892	92,69	268 280	888 172	69,79
22. Semarang	629 038	95,43	208 884	837 922	75,07
23. Temanggung	357 156	96,15	250 989	608 145	58,73
24. Kendal	533 376	92,44	223 164	756 540	70,50
25. Batang	416 576	93,08	180 411	596 987	69,78
26. Pekalongan	480 431	93,03	194 006	674 437	71,23
27. Pemalang	638 570	92,36	335 272	973 842	65,57
28. Tegal	715 224	90,18	360 031	1 075 255	66,52
29. Brebes	910 555	90,17	455 532	1 366 087	66,65
71. Magelang	66 311	91,41	31 767	98 078	67,61
72. Surakarta	288 959	92,08	130 819	419 778	68,84
73. Salatiga	110 256	92,56	46 744	157 000	70,23
74. Semarang	1 023 964	90,43	441 157	1 465 121	69,89
75. Pekalongan	157 260	92,98	79 415	236 675	66,45
76. Tegal	124 590	91,60	68 374	192 964	64,57
Jawa Tengah	18 751 277	94	8 258 019	27 009 296	69,43

Sumber/ Source : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/ August National Labor Force Survey

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISBN 978-623-6294-10-9 (PDF)

